



## Komunike Regional Public Sector Conference III

Selama dua hari ini, Regional Public Sector Conference III, telah diselenggarakan dengan diawali tiga sesi panel pada hari pertama yang mengundang pembicara dari pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, ACCA, Malaysia-MIA, CPA Australia, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dan IAI KASP.

Beberapa hal yang telah dibahas pada hari pertama adalah mengenai realitas *accrual basis* di Indonesia, desain dari pihak regulator, implementasi *accrual basis* di beberapa Negara lain, seperti Malaysia dan Australia, serta optimalisasi nilai guna laporan keuangan melalui peningkatan kualitas informasi keuangan yang komprehensif.

Pada hari kedua, telah didiskusikan oleh pembicara dari RSUD Sidoarjo, BLU, dan BLUD mengenai penerapan tata kelola BLU/BLUD dan manajemen biaya dalam kerangka pelaporan pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik. Serta di sesi terakhir, telah kita saksikan bersama tokoh-tokoh penting di negeri ini untuk memberikan pandangan mengenai perspektif manfaat dan nilai tambah bagi stakeholder dalam memahami akuntansi akrual.

Dari diskusi-diskusi tersebut, untuk menjawab tema RPSC III: “Public Sector Accounting for Public Accountability”, dan sebagai kelanjutan dari RPSC I dan II, sekaligus untuk menghadapi komitmen pemerintah menerapkan *accrual basis* di tahun 2015, maka sebagai komunike-nya, IAI berpandangan:

- Yang pertama adalah untuk penerapan *accrual basis* diperlukan adanya komitmen dari pimpinan, yang selanjutnya harus dikomunikasikan ke seluruh pelaksana.
- Bukti adanya komitmen pimpinan dan pemahaman para pelaksana tersebut diekspresikan dengan membangun infrastruktur yang dapat menunjang implementasi *accrual basis*.



Bagi IAI, infrastruktur tersebut sebaiknya dapat menyediakan informasi berupa:

1. Informasi yang dapat memberikan pemahaman terhadap posisi dan eksistensi entitas pemerintahan
2. Informasi yang dapat memberikan pemahaman atas transaksi keuangan yang dilakukan dan atau melibatkan entitas pemerintahan. IAI berpandangan bahwa pemahaman atas entitas pemerintahan dan transaksi keuangan tersebut dapat menentukan:
  - (1) Informasi mengenai waktu terjadinya transaksi dan
  - (2) Informasi yang dapat memberikan instrumen untuk mengukur asersi penilaian atas transaksi tersebut.

Jika keempat informasi tersebut terpenuhi, maka pencatatan dengan basis apapun termasuk dengan basis akrual menjadi hal yang mudah untuk dicapai. Selain itu, pendefinisian atas suatu transaksi haruslah mengikuti ketentuan regulasi mengingat entitas pemerintahan adalah entitas publik yang dibentuk dan diatur oleh regulasi.

- Selanjutnya IAI akan mendorong pemerintah untuk mendokumentasikan semua informasi tersebut agar laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih handal, dapat ditelusuri dan auditable.
- Formula untuk merumuskan dan menggunakan “Empat Informasi untuk Akrual dalam Tiga Langkah Implementasi” tersebut selanjutnya kami sebut dengan “*IAI Accrual Implementation Model*”

Selanjutnya kami berharap komunikasi ini dapat menjadi model untuk mendorong pemerintah dan dapat mempermudah implementasi *accrual basis* pada tahun 2015.